

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai peningkatan aktivitas ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Indikator ini mencerminkan kemampuan suatu perekonomian dalam meningkatkan kapasitas produksinya, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kajian mendalam terkait pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menunjukkan bahwa proses tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, memperluas peluang kerja, serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah melalui peningkatan penerimaan pendapatan. Pendapatan tersebut kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan prioritas pada berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, serta penguatan infrastruktur nasional. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang stabil, upaya dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan jauh sulit dicapai. Oleh karena itu, studi mengenai pertumbuhan ekonomi tetap relevan untuk memahami arah dan kualitas pembangunan suatu negara (Todaro & Smith, 2015).

Pembangunan ekonomi dimaknai sebagai suatu hal yang menyangkut suatu proses perubahan secara berkelanjutan, terdapat adanya peningkatan pendapatan per kapita yang berlangsung secara berkesinambungan dalam periode waktu yang panjang. Paradigma pembangunan bukan hanya dilihat dari penambahan output perekonomian saja, melainkan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperluas pilihan hidup mereka. Artinya, semakin

meningkatnya perekonomian suatu negara, maka semakin banyak pula tersedianya barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan serta preferensi luas dimasyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi juga berperan secara signifikan dalam mengatasi kesenjangan antara negara maju dan berkembang, baik dari segi pendapatan, akses terhadap teknologi, maupun kualitas hidup secara keseluruhan (Amalia et al., 2022).

Pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup pertumbuhan output secara kuantitatif, tetapi juga transformasi struktural yang mencakup perubahan dalam sektor produksi, distribusi sumber daya, serta peningkatan kualitas kelembagaan, sosial, pendidikan, dan teknologi. Mereka menekankan bahwa tujuan akhir pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata (Todaro & Smith, 2015). Dalam konteks Indonesia, pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi, investasi, dan ekspor. Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi ukuran utama untuk menilai capaian pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun, PDB nasional pada hakikatnya merupakan agregasi dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berasal dari masing-masing provinsi dan kabupaten/kota (BPS, 2024). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional harus dimulai dari penguatan ekonomi di tingkat regional atau daerah. Menurut Bahasoan et al., (2024) menjelaskan bagaimana otonomi daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan yang berperan penting dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi regional melalui pelimpahan tanggung jawab yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan ini memungkinkan penyusunan dan implementasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap potensi, kebutuhan, dan karakteristik lokal.

Selain itu, otonomi daerah juga diharapkan dapat mempercepat penyediaan infrastruktur serta mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Pada dasarnya, otonomi daerah bertujuan meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan serta memperbaiki tata kelola pemerintahan pada level daerah. Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi regional melalui pengelolaan sumber daya yang lebih responsif dan sesuai dengan karakteristik lokal.

Jawa Timur menempati peran yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laporan *Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2024*, wilayah Jawa Timur mencakup area seluas kurang lebih 48.036,84 km² yang terbagi menjadi 38 kabupaten dan kota. Kondisi geografisnya didominasi oleh daratan, namun juga memiliki wilayah kepulauan yang tersebar di berbagai daerah pesisir. Lokasi strategis dan ketersediaan sumber daya alam menjadikan Jawa Timur berperan sebagai daerah utama dalam pengembangan ekonomi di Pulau Jawa. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2024, jumlah penduduk Jawa Timur tercatat sebesar 41.814,5 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,75%, sedangkan kepadatan penduduk per km² sebesar 870 jiwa/km² (BPS, 2024). Data-data tersebut memberikan gambaran umum mengenai karakteristik demografis dan geografis Provinsi Jawa Timur. Informasi ini penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada kondisi riil masyarakat dan potensi wilayah. Maka pembangunan daerah yang dapat dicerminkan terhadap

nilai PDRB Provinsi Jawa Timur jika dibandingkan dengan provinsi lainnya akan digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 PDRB Per Kapita Provinsi (dalam juta rupiah) 2020-2024)

Provinsi/Province	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	57,29	62,26	71,04	74,96	78,62
1. Jakarta	262,62	274,66	299,67	322,62	344,35
2. Jawa Timur	56,64	59,99	66,25	71,12	75,77
3. Banten	52,73	55,38	61,41	66,15	70,28
4. Jawa Barat	43,24	45,23	49,14	52,65	56,08
5. DI Yogyakarta	37,69	40,52	44,64	48,36	51,47
6. Jawa Tengah	36,96	38,57	41,93	45,17	47,97

Sumber : BPS, data diolah 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, dapat dilihat adanya peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di enam provinsi di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten, dalam rentang waktu 2020–2024. Secara keseluruhan, setiap provinsi memperlihatkan kecenderungan peningkatan nilai PDRB pada setiap tahunnya. PDB atas dasar harga konstan secara nasional mengalami pertumbuhan dari 57,29 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 78,62 juta rupiah pada tahun 2024. Di antara provinsi-provinsi tersebut, DKI Jakarta mencatat kontribusi tertinggi terhadap PDRB nasional, dengan nilai yang meningkat signifikan dari 262,62 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 344,35 juta rupiah pada tahun 2024.

Provinsi Jawa Timur, sebagai wilayah yang menjadi fokus penelitian ini, juga menunjukkan tren peningkatan PDRB yang konsisten dari 56,64 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 75,77 juta rupiah pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menggambarkan bahwa Jawa Timur berkontribusi signifikan terhadap

pembentukan struktur ekonomi nasional, sejajar dengan provinsi besar lainnya seperti Jawa Barat dan Banten. Selain itu, data tersebut memperlihatkan bahwa laju peningkatan PDRB per kapita Jawa Timur relatif stabil dan tidak mengalami fluktuasi tajam seperti beberapa provinsi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki struktur ekonomi yang cukup kuat dan resilien, sehingga menjadi dasar objek penelitian yang relevan untuk mengkaji sejauh mana investasi, belanja daerah, dan tenaga kerja berperan dalam mendorong PDRB.

Tabel 1.2 Jumlah Investasi Provinsi Jawa Timur 2020-2024 (Milyar Rupiah)

Tahun	Jumlah Investasi
2020	78.347,19
2021	79.550,15
2022	110.329,47
2023	145.103,77
2024	147.326,28

Sumber : BKPM, data diolah 2024

Berdasarkan pada tabel 1.2 jumlah investasi di Jawa Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Kenaikan investasi Jawa Timur yang terjadi secara konsisten berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan PDRB. Semakin besar dan berkelanjutan investasi yang masuk, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan output ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan struktur ekonomi daerah. Hal ini memperbesar kapasitas produksi sektor-sektor ekonomi, sehingga nilai tambah yang dihasilkan daerah meningkat dan secara langsung menaikkan PDRB. Dalam data realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2024 yang disampaikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM) bahwa Provinsi Jawa Timur menempati peringkat ketiga sebagai lokasi investasi terbesar di Indonesia, dengan nilai investasi mencapai Rp147,3 triliun atau sebesar 8,6% dari total investasi nasional. Posisi ini

menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki daya tarik investasi tinggi dan berperan strategis dalam mendukung perekonomian nasional.

Tabel 1.3 Jumlah Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 2020-2024 (Milyar Rupiah)

Tahun	Jumlah Belanja Daerah
2020	90.323,33
2021	92.808,17
2022	100.759,51
2023	97.372,59
2024	107.196,96

Sumber : djpk kemenkeu, data diolah 2024

Berdasarkan pada tabel 1.3 jumlah belanja daerah Provinsi Jawa Timur sebagai objek penelitian didasarkan pada kinerja fiskal daerah yang relatif impresif, sebagaimana tercermin dalam data djpk kemenkeu mengenai tingkat penyerapan belanja daerah. Pada periode pengamatan, Jawa Timur mencatat tingkat penyerapan belanja sebesar 110,17 persen, yang tidak hanya melampaui target anggaran tahunan, tetapi juga menempatkannya sebagai salah satu provinsi dengan kinerja fiskal tertinggi di Pulau Jawa. Capaian ini secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi besar lainnya, seperti DKI Jakarta yang mencapai 89,49 persen dan Jawa Tengah sebesar 96,40 persen. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja daerah yang tepat sasaran. Berdasarkan teori ekonomi makro, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen utama dalam agregat permintaan yang diharapkan mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap output daerah. Di sisi lain, total belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan pola yang fluktuatif. Berdasarkan data tahunan, jumlah belanja daerah pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 90.323,33 miliar, kemudian naik menjadi Rp 92.808,17 miliar

pada 2021, dan mencapai Rp 100.759,51 miliar pada 2022. Namun, pada tahun 2023, belanja daerah justru mengalami kontraksi menjadi Rp 97.372,59 miliar sebelum kembali meningkat menjadi Rp 107.196,96 miliar pada tahun 2024.

Tabel 1.4 Jumlah Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur 2020-2024 (Jiwa)

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja
2020	20.962.967
2021	21.037.750
2022	21.613.293
2023	22.703.177
2024	24.381.761

Sumber : BPS, data diolah 2024

Berdasarkan pada tabel 1.4 jumlah tenaga kerja Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2024 yang ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pemilihan pada Provinsi Jawa Timur juga dilatar belakangi oleh besarnya potensi dan peran tenaga kerja dalam perekonomian daerah. Pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja tercatat sebesar 20.962.967 jiwa, kemudian meningkat menjadi 21.037.750 jiwa pada tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah tenaga kerja mencapai 21.613.2913 jiwa, dan terus meningkat secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 22.703.177 jiwa. Pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja di Jawa Timur mencapai 24.381.761 jiwa. Selain itu, struktur ekonomi Jawa Timur yang masih relatif padat karya menjadikan tenaga kerja sebagai faktor produksi yang sangat dominan. Besarnya jumlah tenaga kerja yang terus meningkat berpotensi menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat menjadi tantangan apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang produktif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Timur dipandang sebagai objek penelitian yang relevan

untuk mengkaji sejauh mana belanja daerah, bersama dengan investasi dan tenaga kerja, berperan dalam mendorong PDRB. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah secara akurat, penelitian ini menggunakan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pemilihan PDRB ADHK didasarkan pada kebutuhan untuk menangkap nilai pertumbuhan ekonomi secara riil dengan mengeliminasi pengaruh fluktuasi harga atau inflasi yang terjadi selama periode pengamatan. Dengan menggunakan harga pada tahun dasar yang tetap, PDRB ADHK mampu mencerminkan perubahan output produksi barang dan jasa secara fisik, sehingga fluktuasi nilai yang terjadi benar-benar merepresentasikan dinamika produktivitas daerah. Hal ini sangat krusial dalam analisis pembangunan wilayah di Jawa Timur yang memiliki tingkat inflasi dan karakteristik ekonomi daerah yang beragam. Penggunaan data riil ini menjamin bahwa pengaruh variabel investasi, belanja daerah, dan tenaga kerja yang dianalisis dalam penelitian ini tidak terdistorsi oleh faktor moneter semata, melainkan mencerminkan dampak nyata terhadap peningkatan kemakmuran dan kapasitas produksi di masing-masing kabupaten/kota.

Penelitian ini memilih untuk menggunakan nilai nominal PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk menangkap gambaran kapasitas ekonomi wilayah secara utuh. Penggunaan data dalam bentuk level (PDRB) memungkinkan model untuk mengidentifikasi besarnya skala ekonomi suatu daerah, yang mana sangat

relevan dalam analisis data panel untuk melihat ketimpangan atau disparitas antarwilayah. Berbeda dengan laju pertumbuhan ekonomi yang hanya menunjukkan kecepatan perubahan dalam satu periode tanpa memperhatikan titik awal ekonomi suatu daerah, nilai PDRB mencerminkan akumulasi hasil pembangunan dan potensi riil yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penggunaan data PDRB dalam bentuk nilai absolut mempermudah transformasi data ke dalam bentuk logaritma natural ($\ln$) guna menyamakan satuan (skala) dengan variabel independen lainnya, sehingga koefisien regresi yang dihasilkan dapat diinterpretasikan sebagai nilai elastisitas yang lebih akurat dalam menjelaskan pengaruh investasi, belanja daerah, dan tenaga kerja terhadap ukuran ekonomi daerah.

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap PDRB, sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji variabel-variabel yang memengaruhi PDRB di berbagai daerah di Indonesia. Namun, perbedaan karakteristik wilayah, periode waktu, serta pendekatan analisis yang digunakan menyebabkan hasil penelitian menunjukkan temuan yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan penelaahan kembali terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu guna mengidentifikasi adanya *research gap* yang relevan dengan kondisi Provinsi Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Patanduk et al. (2019) mengenai pengaruh investasi, belanja pemerintah, dan tenaga kerja terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan hasil yang beragam. Hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB, tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi dan jumlah tenaga kerja belum

secara otomatis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sementara belanja pemerintah memiliki peran yang lebih nyata dalam menggerakkan aktivitas ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2022) dapat dianalisis bahwa pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015–2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMA dan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, demikian pula pengeluaran pemerintah daerah. Sebaliknya, tenaga kerja terbukti berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Temuan ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Timur lebih didorong oleh faktor tenaga kerja dibandingkan oleh investasi dan belanja pemerintah. Sementara itu, penelitian oleh Aldi Rifkyanda (2022) yang meneliti kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menemukan bahwa investasi dan belanja pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, sedangkan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa besar kecilnya investasi tidak selalu sejalan dengan peningkatan PDRB, apabila kualitas dan distribusi investasi belum merata dan juga permasalahan pada efisiensi dan alokasi belanja daerah, sehingga belanja pemerintah tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan adanya ketidakkonsistenan hasil empiris, perbedaan wilayah dan periode penelitian, serta perbedaan pendekatan pengukuran PDRB, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi. Penelitian ini berfokus pada Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu motor utama perekonomian nasional, sehingga

hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang relevan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan investasi, belanja daerah, dan ketenagakerjaan di tingkat regional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan implikasi kebijakan yang berbasis pada kondisi ekonomi aktual daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian empiris dengan menganalisis secara simultan pengaruh investasi, belanja daerah, dan tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur pada periode 2020–2024, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi daerah yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dapat disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variabel investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024?
2. Bagaimana pengaruh variabel belanja daerah terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu 2020–2024?
3. Bagaimana pengaruh variabel tenaga kerja terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur pada periode 2020–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut::

1. Menganalisis pengaruh investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024.
2. Menganalisis sejauh mana belanja daerah berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu 2020–2024.
3. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur pada periode 2020–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Dapat dijabarkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis : Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi regional, khususnya terkait

dengan faktor-faktor yang memengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2. Manfaat praktis : Temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam aspek pengelolaan investasi, belanja daerah, serta pemanfaatan tenaga kerja secara optimal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas referensi akademik dan menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang menelaah pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.